

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu faktor yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan penting dalam mengelola keuangan adalah investasi; sedangkan kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemberian dividen. Kebijakan manajemen keuangan harus memiliki aspek utama, yaitu investasi modal, karena investasi adalah realisasi dari modal yang dapat menghasilkan keuntungan pada masa yang akan datang. Namun, dari sisi lain, manfaat investasi pada masa yang akan datang dapat disertai dengan ketidakpastian atau disebut juga sebagai risiko investasi. (Wastam, 2019)

(Bawinti et al., 2018) Investasi dapat dijelaskan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh investor atau perusahaan untuk memperoleh barang modal dan perlengkapan produksi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al – Qur'an surat Al – Baqarah ayat 245:

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَفِيضُ وَاللَّهُ ۖ كَثِيرَةً أُنْعَافًا لَهُ فَيُضِعُّهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dalam teori Harrod-Domar, yang paling esensial dalam menentukan pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal atau investasi. Salah satu bentuk pembentukan modal adalah melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya dianggap sebagai pengeluaran yang berpotensi meningkatkan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan permintaan efektif masyarakat (Sadono, 2008). UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari investasi, baik itu investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing), adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, hal ini juga diharapkan akan mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan yang disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Laporan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2020, situasi ekonomi Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 sangat berbeda dengan tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 yang mulai terasa pada awal Maret tahun 2020. Akibat penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak Covid-19, terjadi peningkatan kasus PHK dan penundaan kegiatan kerja di berbagai sektor ekonomi yang terkena dampaknya, dimulai sejak triwulan II tahun 2020. Penurunan volume perdagangan dunia terjadi karena pelemahan permintaan global, yang berlangsung seiring dengan diberlakukannya kebijakan sosial

distancing dan travel warning untuk mencegah penyebaran Covid-19. Perlambatan kinerja industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor dari negara mitra dagang, sejalan dengan kondisi ekonomi global yang mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2020. Informasi lebih rinci dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Jawa Barat Tahun 2020 (Triliun Rupiah)

INVESTASI	PMA	PMDN	TOTAL	SELISIH	Pertumbuhan
Triwulan I 2020	13,17	16,72	29,89	-5,54	-15,63%
Triwulan II 2020	19,47	8,53	28,00	-1,88	-6,31%
Triwulan III 2020	18,29	10,14	28,43	0,43	1,54%
Triwulan IV 2020	18,10	16,01	34,11	5,67	19,95%
Tahun 2020	69,03	51,40	120,43	-17,07	-12,41%

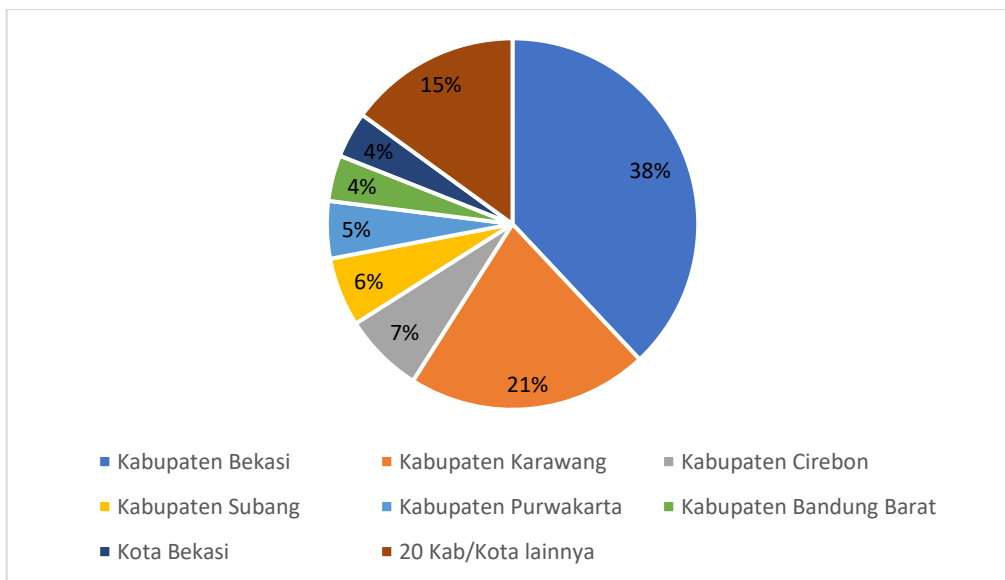
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (diolah)

Dari tabel 1.1 diatas berdasarkan Laporan Realisasi Investasi Jawa Barat tahun 2020 dapat terlihat pada triwulan I dan triwulan II tahun 2020 terdapat penurunan realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 28,00 Triliun Rupiah di triwulan II dengan triwulan I sebesar 29,89 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di triwulan IV mencapai angka 34,11 Triliun Rupiah dikarenakan sudah mengalami pertumbuhan hampir dari semua lini termasuk sudah adanya kepercayaan untuk berinvestasi kembali di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Menurut laporan dari Dinas Penanaman Modal Jawa Barat tentang Realisasi Investasi untuk PMA di Jawa Barat pada tahun 2020, jumlah investasi yang

disuntikkan oleh para investor mencapai Rp 18.097.864.970.489, mengalami penurunan sebesar Rp 3.689.153.529.511 dari periode investasi yang sama pada tahun 2019, yang mencapai Rp 21.787.018.500.000. Jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 17.530 orang, mengalami penurunan sebanyak 5.295 orang dari periode yang sama pada tahun 2019, yang mencapai 22.825 orang. Jumlah proyek juga mengalami penurunan dari 3.081 proyek LKPM pada periode Triwulan IV tahun 2019 menjadi 2.986 proyek LKPM pada Triwulan IV tahun 2020, atau mengalami penurunan sebanyak 95 proyek LKPM.

Berdasarkan Laporan Data Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2020, terdapat beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontribusi tertinggi terhadap pencapaian penanaman modal asing di Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Barat, 2020 (diolah)

Gambar 1. 1 Realisasi Investasi PMA Tertinggi di Tujuh Kabupaten/Kota

Jawa Barat Tahun 2020

Dari Gambar 1.2 diatas berdasarkan Laporan Data Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat tahun 2020, terlihat bahwa potensi setiap kabupaten/kota dapat didaftar dan dipetakan sehingga rencana pembangunan di masa mendatang dapat disesuaikan dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing wilayah. Dengan melakukan analisis perbandingan, rencana strategis dapat diselaraskan untuk memaksimalkan pelaksanaan investasi yang berasal dari PMA. Analisis perbandingan realisasi investasi di 7 kabupaten/kota Jawa Barat tertinggi pada tahun 2020 berada di Kabupaten Bekasi dengan persentase sebesar 38%. Disusul oleh Kabupaten Karawang dengan nilai persentase sebesar 21%. Lalu, Kabupaten Cirebon dengan persentase sebesar 7%, Kabupaten Subang dengan persentase 6%, Kabupaten Purwakarta 5%, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi dengan persentase 4%, dan Kabupaten/Kota lainnya dengan persentase sebesar 15%.

Menurut Badan Pusat Statistika, perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 2.088,04 triliun, sementara PDRB per kapita mencapai Rp 41,8 juta. Ekonomi Jawa Barat tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,44%, turun dari tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Menurut Todaro (2009), pendapatan perkapita menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu wilayah pada periode tertentu, yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto, baik dalam harga saat ini maupun dalam harga yang disesuaikan dengan inflasi. Hubungan yang signifikan terdapat antara tingkat investasi dan PDRB di suatu daerah. Hubungan ini bersifat positif, di

mana kenaikan PDRB akan diikuti oleh peningkatan investasi, dan sebaliknya. Peningkatan pendapatan daerah (PDRB) cenderung meningkatkan permintaan barang dan jasa konsumsi, yang berarti akan menimbulkan kebutuhan akan produksi barang dan jasa konsumsi yang lebih besar. Sektor industri diharapkan dapat memengaruhi jumlah tenaga kerja dan mampu meningkatkan sektor lainnya.

Tyas (2020) menyatakan bahwa meskipun terdapat sumber daya alam yang melimpah dan jumlah populasi tenaga kerja yang besar, Indonesia masih belum bisa berkembang secepat yang diinginkan. Bahkan, jumlah tenaga kerja yang besar tersebut malah menimbulkan masalah baru, yaitu pengangguran. Salah satu dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah upah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengatur salah satu kebijakan pengupahan, yaitu upah minimum. Upah minimum menjadi batas minimum bagi perusahaan untuk memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemiskinan karena upah yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang (Padel & Suman, 2017). Silvia dan Wildan (2023) mengemukakan bahwa upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja di suatu negara. Ketika upah minimum suatu wilayah tinggi, tenaga kerja pun lebih tertarik mencari pekerjaan karena penawaran upah yang tinggi. Hal ini dianggap dapat menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada

permintaan tenaga kerja, semakin rendah tingkat upah, semakin banyak tenaga kerja yang diminta. Kenaikan jumlah tenaga kerja akan mendorong peningkatan investasi asing. Investasi akan terus meningkat jika terdapat upah minimum kabupaten/kota yang rendah, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Kondisi terkini suatu daerah sangat bermanfaat terutama dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam menganalisis potensi, daya saing, serta keunggulan serta kelemahan dari masing-masing kabupaten/kota.

Todaro dan Smith (2009) menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya pendapatan, jumlah proyek investasi yang dilakukan oleh masyarakat juga meningkat. Salah satu pertimbangan krusial adalah faktor infrastruktur yang berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi produk kepada konsumen. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, salah satu upaya untuk mendukung perekonomian adalah dengan meningkatkan infrastruktur. Hal ini terbukti dengan tingkat kualitas jalan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 98%. Jalan-jalan di bagian selatan Jawa Barat, sepanjang 400 kilometer dari barat ke timur, sudah dalam kondisi sangat baik. Di wilayah Cileutuh, pemerintah provinsi telah melakukan perbaikan jalan sepanjang 33 kilometer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memutuskan untuk meneliti Provinsi Jawa Barat karena Jawa Barat menjadi sektor tertinggi dalam investasi asing yang masuk ke Indonesia. Penelitian ini hanya berfokus pada 10

kabupaten/kota tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2016 hingga 2022 karena adanya keterbatasan data yang tersedia. Perlu diketahui faktor-faktor yang terkait dengan Investasi PMA seperti PDRB, Tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Infrastruktur Panjang Jalan. Dengan demikian, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi investasi di Provinsi Jawa Barat. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Barat tahun 2016 hingga 2022”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan penelitian :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Panjang Jalan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Panjang Jalan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penetapan kebijakan Penanaman Modal Asing di Jawa Barat.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan penerapan teori akademis yang dipelajari selama di perguruan tinggi. Hal ini juga menjadi tolak ukur kemampuan menganalisis dan mengaplikasikan ilmu dalam menangani permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang

ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dengan tema yang serupa. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang memerlukan informasi untuk menyusun rancangan penelitian.